



**LAPORAN**  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2019

*Jateng*  
gayeng



**BIRO PEREKONOMIAN**  
**SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara Teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 (satu) tahun anggaran, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerpan Renstra dalam pelaksanaan tupoksi organisasi masing-masing perangkat daerah serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKjIP ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan pemerintah.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan akan mendorong Pemerintah Daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitasnya dalam rangka pencapaian kinerja organisasinya sesuai RPJMD masing-masing dan dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang serta menjadi evaluasi di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Semarang,  
**Kepala Biro Perekonomian**

# DAFTAR ISI

	Hal
PENGANTAR .....	i
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum .....	1
C. Fungsi Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah .....	4
D. Isu Strategis Organisasi .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
A. Perencanaan Kinerja .....	7
1. RPJMD 2018 - 2023 .....	7
2. RENSTRA 2018 - 2023 .....	8
3. Indikator Kinerja Utama 2019 - 2023 .....	11
4. Perjanjian Kinerja .....	11
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
B. Target dan Realisasi Tahun 2019 .....	17
C. Kinerja Keuangan .....	22
1. Analisis Capaian .....	22
2. Program dan Kegiatan .....	23
3. Sasaran Strategis .....	24
4. Permasalahan dan Solusi .....	25
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>27</b>

Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama 2019 -2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
3. LaporanPerkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2019

## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>BAB II</b>	
Tabel II.1 RPJMD 2019 - 2023 .....	7
Tabel II.2 Renstra 2019 - 2023 .....	8
<b>BAB III</b>	
Tabel III.1 Interval Nilai Capaian Kinerja .....	16
Tabel III.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2019 .....	17
Tabel III.3 Capaian Indikator Sasaran 1 .....	18
Tabel III.4 Capaian Indikator Sasaran 2 .....	19
Tabel III.5 Capaian Indikator Sasaran 3 .....	21
Tabel III.6 Permasalahan dan Solusi .....	25

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasal 80, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administrative dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Adapun dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisi kebijakan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan BUMD, serta Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas BUMD dan Perangkat daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
3. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan BUMD dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
4. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata;
6. Pelayana administratif dan pembinaan sumber daya manusia BUMD; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian. Klasifikasi kepegawaian dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Eselon, sebagai berikut :

a. Eselon II.B	:	1 orang
b. Eselon III.A	:	3 orang
c. Eselon IV.A	:	7 orang
d. Staf	:	29 orang
<b>Jumlah total</b>	<b>:</b>	<b>40 orang</b>

2. Klasifikasi Kepegawaian Menurut Pangkat / Golongan Ruang :

- a. Golongan IV-c : 1 orang
- b. Golongan IV-b : 2 orang
- c. Golongan IV-a : 9 orang
- d. Golongan III-d : 4 orang
- e. Golongan III-c : 12 orang
- f. Golongan III-b : 8 orang
- g. Golongan III-a : 1 orang
- h. Golongan II-b : 4 orang
- Jumlah : 40 orang**

3. Klasifikasi Pendidikan Formal :

- a. Pasca Sarjana : 16 orang
- b. Sarjana : 17 orang
- c. Sarjana Muda : 2 orang
- d. SLTA : 5 orang
- Jumlah total : 40 orang**

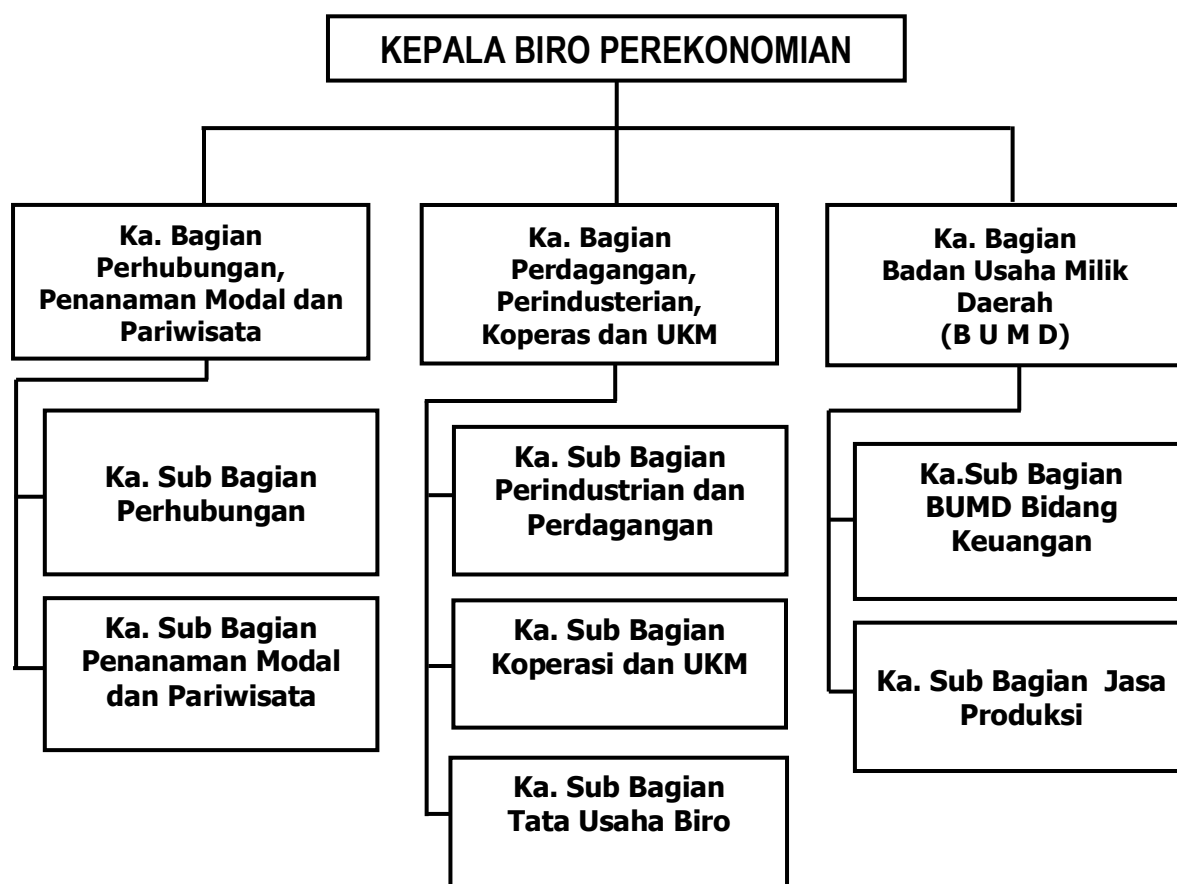
Sedangkan susunan organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Perekonomian;
2. Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
  - a. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Kepala Sub Bagian Koperasi dan UKM;
  - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. Kepala Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata
  - a. Kepala Sub Bagian, Penanaman Modal dan Pariwisata;
  - b. Kepala Sub Bagian Perhubungan.



4. Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - a. Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Keuangan;
  - b. Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Jasa Produksi.

**Struktur Organisasi**  
**BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



**C. Fungsi Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.**

Berdasarkan fungsi strategis tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Peran :

Perumusan program, kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan

BUMD serta ketatausahaan biro, untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- c. Pelaksanaan sebagian urusan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Bidang Sarana Perekonomian dan Bidang Pengembangan Investasi daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

#### **D. Isu Strategis Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, sarana perekonomian, pengembangan investasi dan BUMD serta ketatausahaan biro, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2019.

## **E. Sistematika Penulisan**

1. Bab I Pendahuluan
  - 1.1. Gambaran Umum Organisasi
  - 1.2. Fungsi Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah
  - 1.3. Isu Strategis Organisasi
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

##### 1. RPJMD 2018 - 2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Tabel II.1  
RPJMD 2018 - 2023  
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATU AN	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>						
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100	100
<b>Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>						

Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	100	100	100	100	100
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	100	100	100	100	100
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>						
Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	100	100	100	100
Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100	100	100	100	100
Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	100	100	100	100
<b>Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah</b>						
Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100	100
Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	100	100	100	100
Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100	100

## 2. Renstra 2018-2023

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Perekonomian, sebagai berikut :

Tabel II.2  
RENSTRA 2018 - 2023  
Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah				Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
				Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah			Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80	85	90	93	96

				Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	89	90	93	95
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	100	100	100
		<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12	12	12	12	12
				Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan	12	12	12	12	12

				Makan Minum Rapat rapat					
		<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2	2	2
				Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	4	4	4	4	4
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	5	3	3	3	3



				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	3	3	3	3	3
			Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	3	3	3	3	3
				Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan pariwisata	2	2	2	2	2
		<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah</b>	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	2	2	2	2	2

			dievaluasi pelaksanaannya						
				jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2	2	2	2	2
				jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	3	3	3	3	3
			Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4	4	4	4	4
				jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3	3	3	3	3
			Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	2	2	2	2	2

				jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2	2	2	2	2
		<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah</b>	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1	1	1	1	1
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	4	4	4	4	4
			Persentase tingkat kesehatan BUMD	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1	1	1	1	1
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2	2	2	2	2

			Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1	1	1	1	1
				Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	2	2	2	2	2

### **3. Indikator Kinerja Utama 2018 - 2023**

Berdasarkan Renstra Tahun 2018 - 2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah menetapkan seluruh indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU sebagaimana terlampir.

### **4. Perjanjian Kinerja**

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Adapun Perjanjian kinerja Biro Perekonomian Tahun 2019 secara lengkap sebagaimana terlampir.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1  
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

**“Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”** merupakan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan Renstra Tahun 2018 - 2023, sedangkan didalam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Tengah terdapat 8 (delapan) Biro yang membantu dalam pencapaian ujian tersebut. Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
2. Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah .

## B. Target Dan Realisasi Tahun 2019

Untuk mengetahui realisasi kinerja tahun 2019, sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
Meningkat-kan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	80
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85
		2. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum lingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	100
--	--	---	-----

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

- a) Indikator Sasaran 1 : Persentase hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang terealisasi.

Tabel III.3  
Capaian Indikator Sasaran 1

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja 2019 (%)</b>	<b>Realisasi 2019 (%)</b>	<b>Capaian Tahun Lalu</b>	<b>Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra (%)</b>
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	80	80	-	100 (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan. Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 92,72 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam policy brief sebesar dengan tingkat capaian 100 % dengan keberhasilan dalam mencapai rekomendasi dengan tahap rapat dan monitoring dengan OPD terkait, 35 Kab/Kota dan



steakholder dalam hal pengumpulan data dalam mencapai hasil guna memperoleh suatu kebijakan.



Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

- b) Indikator Sasaran 2 : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi.

Tabel III.4  
Capaian Indikator Sasaran 2

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja 2019 (%)</b>	<b>Realisasi 2019 (%)</b>	<b>Capaian Tahun Lalu</b>	<b>Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra (%)</b>
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang	85	85	-	100 (tahunan)

Pemerintahan yang terealisasi				
-------------------------------	--	--	--	--

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan . Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 94,38 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar dengan tingkat capaian 100 % yang tertuang dalam jumlah laporan monitoring dengan dasar untuk menyamakan leglitas dalam mencapai acuan/output sehingga dapat digunakanke seluruh 35 Kab/Kota di Jawa Tengah.



Rapat Koordinasi Pembiayaan Usaha Mikro dan Menengah se Jawa Tengah



Konsultasi ke Pusat Kementerian Keuangan



Rapat Koordinasi Pembiayaan Keuangan Mikro (LKM)



Monev di Kabupaten Banjarnegara berkaitan DBHCHT

c) Indikator Sasaran 3 : Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi

Tabel III.5  
Capaian Indikator Sasaran 3

<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja 2019 (%)</b>	<b>Realisasi 2019 (%)</b>	<b>Capaian Tahun Lalu</b>	<b>Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra (%)</b>
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	-	100 (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan . Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 87,76 %, Biro Perekonomian dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar dengan tingkat capaian 100 % yang tertuang dalam jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah dengan mengumpulkan semua jenis pengaduan - pengaduan yang di tujukan ke Provinsi Jawa Tengah (Biro Perekonomian) dengan dasar memotong rantai biro kerasi dalam pelayanan masyarakat.



Rapat Koordinasi TPAKD dalam rangka kegiatan peningkatan pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM

## **C. Kinerja Keuangan**

### **1. Analisis Capaian**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan APBD 2019 dengan anggaran Rp. 7.000.000.000,- yang terdiri dari 4 (empat) program dengan 22 kegiatan. Dan pada akhir tahun 2019 target keuangan yang telah dicapai sebesar Rp. 6.384.862.543,- atau sebesar 91,21 % dengan realisasi fisik tercapai 100 %. Adapun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Biro Perekonomian Tahun 2019 secara lengkap sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan APBD Biro Perekonomian dapat dianalisis atas efisiensi penggunaan anggaran (sumber daya) Rp. 6.384.862.543,- (91,21 %) dari anggaran Rp. 7.000.000.000,- dengan realisasi fisik tercapai 100 %. Sehingga hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar Rp. 615.137.457 ,- (8,79 %) yang merupakan silpa untuk kegiatan penyusunan

kebijakan BUMD bidang keuangan dan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan BUMD bidang keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Efisiensi anggaran pada sewa tempat kegiatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan rakor di gabung menjadi satu;
- c. Honor nara sumber yang tidak hadir;
- d. Perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai kebutuhan.

## **2. Program/kegiatan**

Pada dasarnya semua ke 4 (empat) program dengan 22 kegiatan merupakan program/kegiatan yang menunjang kinerja Biro perekonomian, hal ini dapat di buktikan dengan adanya prestasi yang diraih oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, seperti :

- a. TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) terbaik;
- b. Tingkat kesehatan PD BPR BKK se Jawa Tengah dengan deviden yang tinggi;
- c. Penyerapan KUR (Kredit Usaha Rakyat) tertinggi;
- d. Penghargaan pelopor inklusi keuangan;
- e. Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- f. PD BPR BKK Purwodadi memperoleh 6(enam) penghargaan TOP BUMD yang diselenggarakan oleh majalah Business;
- g. Bersama OPD, Jawa Tengah berhasil menata transportasi umum dengan meraih piala WTN Wiratama 2019.

## **3. Sasaran Strategis**

- a. Memaksimalkan kebijakan yang sudah direkomendasikan pada rumpun ekonomi;
- b. Melaksanakan Misi dan Visi Gubernur Tengah salah satunya dengan melaksanakan program prioritas yang dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan yang bekerja sama dengan OPD yang ada seperti :
  - 1) Optimalisasi peran TPID untuk menjaga ketersediaan, kestabilan harga/inflasi rendah sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

- 2) Optimalisasi penggunaan DBHCHT untuk kepentingan/kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan mendukung kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bidang Koperasi, LKM dan UKM.
- 4) Melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga Perekonomian yang ada di Desa (BUMDes dan Koperasi).
- 5) Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- 6) Melaksanakan penyusunan kebijakan melalui Rapat Sinergitas Pengembangan dan koordinasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan pengawalan OPD ampunan dengan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan OPD, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang BUMD, koordinasi terhadap program-program prioritas dan program strategis gubernur dan monev pelaksanaan kebijakan.
- 8) Mendorong pemberian kredit kepada UMKM oleh PD BPR BKK dan PD BKK serta penjaminannya oleh PT. Jamkrida Jateng.
- 9) Mendorong pemanfaatan dana CSR BUMD Pemprov. Jateng untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan.
- 10) Melaksanakan fasilitasi dan pengawalan OPD ampunan dengan melaksanakan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan OPD, dan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perhubungan, penanaman modal dan pariwisata melalui penyusunan policy brief, koordinasi terhadap program-program prioritas dan program strategis gubernur dan monev pelaksanaan kebijakan.

#### 4. Permasalahan dan solusi

Tabel III.6  
Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Beberapa kabupaten kehilangan status daerah penghasil cukai/tembakau;	Koordinasi dengan kanwil bea cukai setempat, DJPK dan pihak terkait;
2	Serapan alokasi DBHCHT khususnya untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih kurang maksimal;	Memaksimalkan serapan alokasi dana DBHCHT;
3	UMKM di Jawa Tengah belum terfasilitasi semua terkait program KUR;	Melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kab/Kota se Jateng untuk dapat bekerjasama dengan bank penyalur KUR mensosialisasikan program KUR kepada UMKM;
4	Belum semua Pemda Kab/Kota se-Jawa tengah yang mempunyai SK Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);	Melakukan Rapat Koordinasi dengan pelaku UMKM di Jateng untuk memberikan informasi terkait dengan program KUR;
5	Tidak terfasilitasinya LKM yang belum berbadan hukum akan bertransformasi sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2013;	Melakukan rapat koordinasi dengan Pemda Kab/Kota terkait upaya pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan ditindaklanjuti dengan menyurati dengan Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota se Jateng;
6	Sinergi antar BUMD masih kurang optimal;	Memberikan fasilitasi kemudahan proses transformasi legalitas LKM kepada para pengelola LKM di Jawa Tengah;
7	Penguatan dollar terhadap rupiah ternyata tidak diikuti dengan kenaikan harga komoditas pertanian utamanya harga karet (PD CMJT);	Memfasilitasi BUMD untuk bersinergi antar BUMD serta bersinergi dengan SKPD terkait (telah terealisasi MoU sinergi BUMD/N Pemprov. Jateng);
8	Perda BUMD tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis;	Menunggu hingga harga kembali tinggi sehingga persediaan karet (PD CMJT) akan dijual sehingga mendapatkan margin keuntungan yang optimal;
9	Plafon nominal penyertaan modal BUMD telah hampir dan dibutuhkan perubahan Perda Penyertaan Modal;	Secara bertahap akan disesuaikan Perda BUMD, tahun 2019 sedang diproses untuk Perubahan Perda Penyertaan Modal BUMD, BUMN dan Pihak Ketiga Lainnya;



10	Terjadinya rush pada PD BKK Pringsurat;	Secara bertahap akan dilaksanakan pengembalian dana nasabah yang ditempatkan di PD BKK Pringsurat melalui polling fund dari PD BKK lainnya yang sehat, dan diupayakan percepatan penyelesaian permasalahan PD BKK Pringsurat melalui konsolidasi PD BKK se Jawa Tengah;
11	Beberapa BUMD seperti : PDAB Tirta Utama, Jamkrida, PT Bank Jateng, PD BPR BKK dan BKK memerlukan support penyertaan modal yang besar;	Perda penyertaan modal BUMD telah masuk prolegda pada tahun 2019; Penambahan penyertaan modal melalui APBD atau sumber lainnya (internal BUMD) maupun penerbitan obligasi daerah;

## **BAB IV P E N U T U P**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah memiliki Visi terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perekonomian untuk mendukung terwujudnya Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dan Misi mewujudkan kebijakan umum pemerintahan daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan daerah, perekonomian yang semakin tertib, stabil dan mantap mempunyai tujuan mewujudkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan bidang perekonomian yang lebih baik guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sebagai SKPD non teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **Amat Baik**.

Penggunaan Tahun Anggaran 2019 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp. 615.137.457 ,- (8,79 %)** dari anggaran yang disediakan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

**Kepala Biro Perekonomian**

**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BIRO PEREKONOMIAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018-2023**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator)
<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah		
1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Porsentase rekomendasi bidang perekonomian yang terealisasi	Agar diketahui jumlah % dengan cara jumlah usulan kebijakan yang dimanfaatkan pimpinan yang dibagi dengan jumlah usulan kebijakan yang dihasilkan
2. Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	a. Persentase keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis bidang perekonomian	Agar diketahui jumlah % dengan cara jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian yang menjadi target yang dibagi dengan jumlah kebijakan strategis bidang perekonomian
	b. Persentasen capaian kinerja perangkat daerah bidang perekonomian yang dievaluasi	Agar diketahui jumlah % dengan cara jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian yang tercapai sesuai target yang dibagi dengan seluruh jumlah IKU perangkat daerah bidang perekonomian
3. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat	Persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum keprotokolan dan kehumasan	Agar diketahui jumlah % dengan cara mengetahui hasil survey IKM pelayanan umum, keprotokolan dan kehumasan.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266

Semarang 50243

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BIRO PEREKONOMIAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
<b>Tujuan : Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)</b>			
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	85
2	Meningkatnya Efektifitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100
3	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di Lingkungan Sekretariat	Persentase keberhasilan pelaksanaan pelayanan umum keprotokolan dan kehumasan	85

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007



## ANGGARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Manajemen Adm Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	440.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
2	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.838.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
3	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah	3.144.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah	1.578.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	Jumlah	<b>7.000.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
KEPALA BAGAN BUMD

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591006 198503 1 007

**ANGGARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Manajemen Adm Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>440.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	a. Kegiatan pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah	30.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	b. Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	390.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

	c. Kegiatan pelayanan penyediaan Mamin rapat Perangkat Daerah	20.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
2	<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.838.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM	500.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	c. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan	500.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	d. Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	300.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	e. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan	123.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	f. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata	165.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

3	<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>	<b>3.144.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	a. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan	550.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

	b. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT	1.000.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	c. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM	500.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	d. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan	400.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	e. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi	250.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	f. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan	264.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	g. Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata	180.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
4	<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>	<b>1.578.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	a. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	b. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM	500.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	c. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan	410.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

d.	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi	250.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
e.	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan	68.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
f.	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata	150.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	<b>Jumlah</b>	<b>7.000.000.000</b>	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

Semarang, 2020

Pihak Kedua,

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

**HERRU SETIADHIE, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19601014 198903 1 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
KEPALA BAGAN BUMD

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591006 198503 1 007





# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266

Semarang 50243

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : HAERUDIN, SH.MH

Jabatan : Kepala Bagian BUMD

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

KEPALA BAGAN BUMD

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**HAERUDIN, SH.MH**

Pembina Utama Madya

Pembina Tk. I

NIP. 19591006 198503 1 007

NIP. 19700729 199603 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**BIRO PEREKONOMIAN**

No	Program	Indikator program	Target (%)
1	2	3	4
1	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	83
2	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	85
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase tingkat kesehatan BUMD	80

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

KEPALA BAGAN BUMD

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**HAERUDIN, SH.MH**

Pembina Utama Madya

Pembina Tk. I

NIP. 19591006 198503 1 007

NIP. 19700729 199603 1 001



## ANGGARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	800.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
2	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	650.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
3	Persentase tingkat kesehatan BUMD	660.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	Jumlah	2.110.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007

KEPALA BAGAN BUMD

**HAERUDIN, SH.MH**

Pembina Tk. I

NIP. 19700729 199603 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266

Semarang 50243

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SAFITRI HANDAYANI, SH, Sp.N, M.Kn

Jabatan : Kepala Bagian Perindagkop dan UKM

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

KEPALA BAGIAN PERINDAGKOP dan UKM

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**SAFITRI HANDAYANI, SH, Sp.N, M.Kn**

Pembina Utama Madya

Pembina Tk. I

NIP. 19591006 198503 1 007

NIP. 19620420 198903 2 005

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

## BIRO PEREKONOMIAN

No	Program	Indikator program	Target (%)
1	2	3	4
1	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	80
2	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	85
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	80

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN PERINDAGKOP dan UKM

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**SAFITRI HANDAYANI, SH, Sp.N, M.Kn**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19591006 198503 1 007

Pembina Tk. I  
NIP. 19620420 198903 2 005

## ANGGARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	750.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
2	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	2.050.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
3	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	700.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	Jumlah	3.500.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PERINDAGKOP dan UKM

**SAFITRI HANDAYANI, SH, Sp.N, M.Kn**

Pembina Tk. I

NIP. 19620420 198903 2 005



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran ) Fax. 8311266

Semarang 50243

---

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : AGUS PRASUTIO, SH, M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : EDrs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM

Jabatan : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN PERHUBUNGAN, PENANAMAN  
MODAL DAN PARIWISATA

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**AGUS PRASUTIO, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

Pembina Tk. I

NIP. 19591006 198503 1 007

NIP. 19690726 199003 1 002

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

## BIRO PEREKONOMIAN

No	Program	Indikator program	Target (%)
1	2	3	4
1	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80
2	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	87
3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya fungsinya	82

Semarang,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN PERHUBUNGAN, PENANAMAN  
MODAL DAN PARIWISATA

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

**AGUS PRASUTIO, SH, M.Si**

Pembina Utama Madya

Pembina Tk. I

NIP. 19591006 198503 1 007

NIP. 19690726 199003 1 002



## ANGGARAN KEGIATAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2019

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	288.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
2	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	444.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
3	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	218.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019
	Jumlah	950.000.000	Sumber Anggaran dari APBD Th. 2019

Semarang,

2020

ihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN PERHUBUNGAN, PENANAMAN MODAL  
DAN PARIWISATA

**Drs. Ign. INDRA SURYA, M.HUM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19591006 198503 1 007

**AGUS PRASUTIO, SH, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19690726 199003 1 002

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

SKPD : BIRO PEREKONOMIAN DAERAH  
KEPALA SKPD :  
BENDAHARA PENGELUARAN : RAHMAWATI AGUSTIA, SE  
BULAN : Desember

NO	KODE KEGIATAN	NAMA PROGRAM KEGIATAN	BENDAHARA PENGELUARAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK s/d BULAN INI		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	KETERANGAN
					(Rp)	(%)	SP2D (Rp)	S/D BULAN INI		S/D BULAN INI			
								(Rp)	(%)	(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>NON URUSAN</b>											
		<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>											
1	0.00.4.06.03.01.0002	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah		30,000,000	30,000,000	100,00	26,912,000	30,000,000	100	30,000,000	100,00		
2	0.00.4.06.03.01.0006	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah		390,000,000	390,000,000	100,00	379,558,571	388,208,571	99.54	390,000,000	100,00		
3	0.00.4.06.03.01.0007	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah		20,000,000	20,000,000	100,00	17,155,000	17,755,000	88.78	20,000,000	100,00		
		<b>FUNGSI LAINNYA</b>		<b>440,000,000</b>						<b>96.11</b>			
		<b>Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>											
4	4.06.4.06.03.15.0002	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan		250,000,000	250,000,000	100,00	220,824,895	227,474,895	90.99	250,000,000	100,00		
5	4.06.4.06.03.15.0003	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM		500,000,000	500,000,000	100,00	489,420,100	494,102,100	98.82	500,000,000	100,00		
6	4.06.4.06.03.15.0004	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan		500,000,000	500,000,000	100,00	354,106,933	385,777,534	77.16	500,000,000	100,00		
7	4.06.4.06.03.15.0005	Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi		300,000,000	300,000,000	100,00	191,192,678	270,651,377	90.22	300,000,000	100,00		
8	4.06.4.06.03.15.0006	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan		123,000,000	123,000,000	100,00	90,671,019	114,878,019	93.4	123,000,000	100,00		
9	4.06.4.06.03.15.0007	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata		165,000,000	165,000,000	100,00	120,903,484	156,000,184	94.55	165,000,000	100,00		
		<b>Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>		<b>1,838,000,000</b>						<b>92.72</b>			
10	4.06.4.06.03.17.0009	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan		550,000,000	550,000,000	100,00	448,952,518	473,190,268	86.03	550,000,000	100,00		
11	4.06.4.06.03.17.0010	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT		1,000,000,000	1,000,000,000	100,00	808,949,110	945,754,516	94.58	1,000,000,000	100,00		
12	4.06.4.06.03.17.0011	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi, LKM dan UKM		500,000,000	500,000,000	100,00	486,821,000	494,990,000	99	500,000,000	100,00		
13	4.06.4.06.03.17.0012	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan		400,000,000	400,000,000	100,00	274,521,191	310,440,529	77.61	400,000,000	100,00		
14	4.06.4.06.03.17.0013	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi		250,000,000	250,000,000	100,00	212,231,289	215,067,389	86.03	250,000,000	100,00		
15	4.06.4.06.03.17.0014	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan		264,000,000	264,000,000	100,00	245,030,330	262,823,330	99.55	264,000,000	100,00		
16	4.06.4.06.03.17.0015	Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata		180,000,000	180,000,000	100,00	158,732,670	175,598,670	97.55	180,000,000	100,00		
		<b>Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah - Biro Perekonomian Daerah</b>		<b>3,144,000,000</b>									
17	4.06.4.06.03.18.0002	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan		200,000,000	200,000,000	100,00	175,610,535	191,340,191	95.67	200,000,000	100,00		
18	4.06.4.06.03.18.0003	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM		500,000,000	500,000,000	100,00	484,648,200	491,078,200	98.22	500,000,000	100,00		
19	4.06.4.06.03.18.0004	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan		410,000,000	410,000,000	100,00	333,462,847	360,208,847	87.86	410,000,000	100,00		
20	4.06.4.06.03.18.0005	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi		250,000,000	250,000,000	100,00	135,973,750	163,832,650	65.53	250,000,000	100,00		
21	4.06.4.06.03.18.0006	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan		68,000,000	68,000,000	100,00	57,755,699	67,128,699	98.72	68,000,000	100,00		
22	4.06.4.06.03.18.0007	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata		150,000,000	150,000,000	100,00	137,811,574	148,561,574	99.04	150,000,000	100,00		
				<b>1,578,000,000</b>									
<b>* Jumlah/Rata-rata</b>				<b>7,000,000,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>100,00</b>	<b>5,851,245,393</b>	<b>6,384,862,543</b>	<b>91,21</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>100,00</b>		

Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 6.391.245.393

Semarang, 07 Januari 2020